



Vietnam' S Bamboo Diplomacy: From Tradisional To Modern

Diplomasi Bambu Vietnam: Dari Tradisi Ke Modernitas

1) 2) **Dr. Van Kim Hoang Ha**

¹⁾University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam

²⁾Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam

*email korespondensi: havan.fos@hcmussh.edu.vn

DOI:

10.30595/jppm.xxxx

Histori Artikel:

Diajukan:

03/05/2025

Diterima:

09/05/2025

Diterbitkan:

01/06/2025

Abstract

This article examines the concept and strategic evolution of Vietnam's "bamboo diplomacy", a term that has recently gained prominence in the country's foreign policy discourse. Symbolizing flexibility, resilience, and cultural rootedness, the bamboo metaphor reflects a diplomatic philosophy that is firm in principles yet flexible in strategy, embodying the national identity shaped by a long history of struggle for independence and peaceful coexistence. Through a qualitative research approach, the study integrates theoretical perspectives from realism, constructivism, soft power, and identity diplomacy. The article traces the historical trajectory of Vietnam's foreign policy across four stages: traditional diplomacy during the feudal era, revolutionary diplomacy during the wars of independence, renovation international integration, and the current phase of deep global engagement. It argues that "bamboo diplomacy" encapsulates the essence of Vietnam's foreign policy: maintaining sovereign independence and core interests while navigating international complexities through strategic flexibility. It highlights Vietnam's increasing reliance on cultural identity and soft power tools to strengthen its international image and partnerships. In conclusion, the article suggests that "bamboo diplomacy" represents a successful model of principled pragmatism, offering valuable insights into how small and medium-sized states can sustain autonomy and influence in an evolving global order.

Keywords: bamboo diplomacy; soft power; Vietnam, Southeast Asia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dan evolusi strategis "diplomasi bambu" Vietnam, sebuah istilah yang baru-baru ini menjadi terkenal dalam wacana kebijakan luar negeri negara tersebut. Melambangkan fleksibilitas, ketahanan, dan akar budaya, metafora bambu mencerminkan filosofi diplomatik yang teguh dalam prinsip tetapi fleksibel dalam strategi, mewujudkan identitas nasional yang dibentuk oleh sejarah panjang perjuangan untuk kemerdekaan dan hidup berdampingan secara damai. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, studi ini mengintegrasikan perspektif teoritis dari realisme, konstruktivisme, soft power, dan diplomasi identitas. Artikel ini menelusuri lintasan historis kebijakan luar negeri Vietnam melalui empat tahap: diplomasi tradisional selama era feodal, diplomasi revolusioner selama perang kemerdekaan, integrasi internasional pasca renovasi, dan fase keterlibatan global yang mendalam saat ini. Artikel ini berpendapat bahwa "diplomasi bambu" merangkum esensi kebijakan luar negeri Vietnam: mempertahankan kemerdekaan berdaulat dan kepentingan inti sambil menavigasi kompleksitas internasional melalui fleksibilitas strategis. Artikel ini menyoroti meningkatnya ketergantungan Vietnam pada identitas budaya dan perangkat soft power untuk memperkuat citra dan kemitraan internasionalnya. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa "diplomasi bambu" merupakan model pragmatisme berprinsip yang berhasil, yang menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara kecil dan menengah dapat mempertahankan otonomi dan pengaruh dalam tatanan global yang terus berkembang.

Kata kunci: diplomasi bambu, soft power, Vietnam, Asia Tenggara



Pendahuluan

"Diplomasi bambu" saat ini menjadi istilah yang menonjol untuk menggambarkan filosofi dan gaya kebijakan luar negeri Vietnam dalam periode integrasi saat ini (Thu Hoa, 2023). Istilah ini bukanlah mazhab diplomasi yang benar-benar baru, tetapi pada hakikatnya merupakan generalisasi dan visualisasi kebijakan luar negeri yang telah dilaksanakan secara terus-menerus oleh Partai Komunis Vietnam sepanjang sejarah modern. Citra pohon bambu – dengan akar yang kuat, batang yang tegak, serta cabang dan daun yang lentur – digunakan oleh Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong untuk melambangkan sekolah kebijakan luar negeri yang unik pada era Ho Chi Minh (Nguyen Minh Huy, 2024). Karena itu, urusan luar negeri Vietnam selalu "teguh dalam prinsip, fleksibel dalam strategi; lembut, cerdik tetapi sangat tangguh", yang mencerminkan semangat "menggunakan yang tidak berubah untuk menanggapi yang terus berubah" - menggunakan yang tidak berubah (kepentingan inti) untuk menanggapi yang terus berubah (lingkungan eksternal).

Artikel ini ditulis untuk mengklarifikasi konotasi konsep "diplomasi bambu" dalam konteks sejarah-budaya-politik Vietnam, dan sekaligus menganalisis penerapan konsep ini dalam tahap pengembangan politik luar negeri Vietnam. Untuk mencapai tujuan itu, artikel ini menggabungkan landasan teoritis hubungan internasional termasuk realisme, konstruktivisme, diplomasi lunak (soft power) dan diplomasi identitas, sehingga memberikan perspektif multidimensi pada sekolah diplomatik ini dengan identitas Vietnam yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pendekatan diplomatik Vietnam dengan konteks diplomasi Asia Tenggara, untuk menyoroti kesamaan dalam identitas diplomatik kawasan (seperti menegaskan prinsip kemerdekaan, otonomi, non-blok, dan menghargai kekuatan lunak budaya).

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan ilmu politik, hubungan internasional, dan studi budaya-sejarah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam sifat, struktur, dan operasi diplomasi "bambu" dalam kebijakan luar negeri Vietnam.

Pertama, artikel ini menerapkan analisis dokumen sekunder untuk mensintesis dan memproses sumber data ilmiah yang diterbitkan. Bahan-bahan yang digunakan meliputi dokumen-dokumen kebijakan luar negeri Partai dan Negara Vietnam (seperti pidato Sekretaris Jenderal, Resolusi Kongres Partai, Buku Putih tentang Pertahanan Nasional dan Urusan Luar Negeri), artikel-artikel ilmiah, karya-karya penelitian dalam dan luar negeri, yang ditulis dalam bahasa Vietnam, Inggris, dan Indonesia. Pemilihan dokumen bertujuan untuk memastikan keberagaman sistem referensi, termasuk perspektif asli (endogen) dan eksternal (eksogen).

Kedua, artikel ini menggunakan analisis wacana kebijakan untuk menjelaskan bagaimana konsep "diplomasi bambu" dibangun, digunakan, dan dipopulerkan dalam dokumen-dokumen luar negeri Vietnam, sehingga dapat menguraikan makna budaya dan politik yang mendalam dari gambar ini. Pendekatan ini membantu memperjelas hubungan antara simbol bambu dan nilai identitas nasional, dan menunjukkan bagaimana pemikiran kebijakan dibentuk oleh konteks historis dan tujuan strategis.

Ketiga, artikel ini menerapkan analisis teoritis dengan membandingkan kebijakan diplomatik Vietnam dengan kerangka kerja teoritis hubungan internasional, termasuk: realisme, konstruktivisme, soft power dan diplomasi identitas. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara sistematis ciri-ciri menonjol kebijakan luar negeri Vietnam, dengan menjelaskan kesinambungan dan penyesuaian pada setiap periode.

Selain itu, artikel ini juga menggunakan metode perbandingan regional, dengan fokus membandingkan kebijakan luar negeri Vietnam dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah

untuk menyoroti kesamaan dan karakteristik dalam identitas diplomatik kawasan ASEAN – salah satu ruang strategis yang telah sangat memengaruhi kebijakan luar negeri Vietnam sejak Doi Moi.

Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, wacana kebijakan, dan aplikasi teoritis tidak hanya memungkinkan untuk menggambarkan fenomena “diplomasi bambu”, tetapi juga membantu untuk menafsirkan makna, mekanisme pembentukan, dan pengaruhnya dalam lingkungan hubungan luar negeri modern, sehingga berkontribusi untuk menegaskan hal ini sebagai sekolah diplomatik dengan identitas yang berbeda, fleksibilitas, dan adaptasi yang efektif dalam dunia yang terus berubah.

Analisis dan Pembahasan

1. Kerangka teori

a. Realisme

Realisme menekankan bahwa kekuatan dan kepentingan nasional merupakan fokus utama yang mengatur perilaku negara dalam sistem anarkis. Sarjana klasik Hans Morgenthau berpendapat bahwa politik internasional adalah “perebutan kekuasaan,” dan “prinsip utama realisme politik adalah konsep kepentingan yang didefinisikan dalam hal kekuasaan” (Morgenthau, H., 1948).

Dengan kata lain, negara berperilaku berdasarkan pada memaksimalkan kepentingan keamanan dan kekuasaannya. Bila diterapkan dalam diplomasi, pendekatan realis memprediksi bahwa Vietnam – negara yang pernah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan – akan memberi perhatian khusus pada upaya memastikan kepentingan vital dan menyeimbangkan kekuatan melawan negara-negara besar. Misalnya saja dalam semangat realisme, setelah tahun 1975 Vietnam bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok ketika keamanan nasionalnya terancam, atau kini selalu menjunjung tinggi prinsip independensi dan otonomi dalam hubungan luar negeri agar tidak tergantung kepada negara adikuasa

manapun (Anwar, DF, 2018). Realisme menyediakan landasan untuk menjelaskan keteguhan kepentingan inti dalam “diplomasi bambu” – “akar yang kuat dan batang yang kokoh” yang tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi badai geopolitik.

Berbeda dengan realisme, konstruktivisme menekankan peran ide, identitas, dan norma sosial dalam membentuk kepentingan dan perilaku nasional. Alexander Wendt – seorang sarjana konstruktivis terkemuka – menegaskan bahwa “struktur hubungan manusia ditentukan terutama oleh ide-ide bersama daripada oleh kekuatan material”, dan “identitas dan kepentingan subjek dibangun oleh ide-ide bersama, daripada oleh hal-hal bawaan yang diberikan oleh alam” (Zhan Mengshu, 2020). Menurut pendekatan ini, kebijakan luar negeri Vietnam tidak hanya ditentukan oleh faktor material (seperti korelasi kekuatan) tetapi juga oleh identitas sejarah dan budaya bangsa serta pengalaman dan keyakinan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Misalnya, kenangan sejarah perjuangan selama berabad-abad melawan penjajah asing telah menciptakan identitas suatu bangsa yang mencintai kemerdekaan dan perdamaian tetapi bertekad untuk melindungi kedaulatan, yang secara langsung memengaruhi cara Vietnam berperilaku dalam hubungan dengan negara-negara besar. Demikian pula, ideologi sosialis dan pemikiran Ho Chi Minh juga membentuk kepentingan dan tujuan kebijakan luar negeri, seperti yang ditunjukkan oleh penekanan Vietnam pada solidaritas dengan rakyat tertindas dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri. Konstruktivisme membantu menjelaskan “jiwa nasional” dalam diplomasi bambu – yaitu nilai-nilai identitas (seperti perdamaian, kemanusiaan tetapi gigih) yang meresapi kebijakan diplomatik (Nguyen Manh Hung, 2024).

b. Konsep terkait

Konsep “diplomasi lunak” dikaitkan dengan teori kekuatan lunak Joseph Nye dan praktik diplomasi publik dalam hubungan

internasional modern. Joseph Nye mendefinisikan soft power sebagai "kemampuan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau penyuapan" (Andrey Bibnev, 2021). Sumber kekuatan ini berasal dari daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan suatu negara di mata masyarakat internasional. Dalam diplomasi, soft power dikerahkan melalui berbagai instrumen seperti diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, media asing, pertukaran antarmasyarakat, dan lain sebagainya. Jan Melissen, pakar diplomasi, menegaskan bahwa diplomasi publik merupakan salah satu instrumen utama soft power dan kian menjadi fokus aktivitas hubungan luar negeri suatu negara (Andrey Bibnev, 2021).

Bagi Vietnam, "diplomasi lunak" diwujudkan dalam penggunaan cara-cara yang tidak keras untuk meningkatkan pengaruh, seperti mempromosikan budaya Vietnam (pho, ao dai, kesenian tradisional), mengeksport citra negara yang cinta damai, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemeliharaan perdamaian PBB, bantuan kemanusiaan, dll. Upaya-upaya ini menciptakan simpati dan dukungan dari masyarakat internasional, yang secara efektif mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Vietnam selama periode integrasi. Pembentukan Kemitraan Strategis Vietnam dengan banyak negara dan pemilihannya ke badan-badan penting PBB dalam beberapa tahun terakhir sebagian disumbangkan oleh kekuatan lunak dan diplomasi yang terampil (Minh Tu, 2024).

Konsep diplomasi identitas ini mengacu pada bagaimana identitas nasional dan regional membentuk pendekatan dan prioritas diplomatik, serta bagaimana suatu negara menggunakan identitas uniknya sebagai alat kebijakan luar negeri. Dalam mazhab "diplomasi bambu", faktor identitas ditunjukkan dengan jelas – yakni identitas rakyat Vietnam yang cinta damai namun gigih. Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong pernah menekankan bahwa diplomasi Vietnam harus "dijiwai dengan jiwa, karakter, dan semangat rakyat Vietnam" (Nguyen Manh Hung, 2024). Artinya,

diplomasi harus mencerminkan kepribadian Vietnam, dengan terampil memadukan fleksibilitas dan tekad, tradisi dan modernitas. Identitas budaya nasional (seperti solidaritas, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kehormatan nasional) menjadi sumber daya lunak yang meningkatkan kekuatan persuasif diplomasi Vietnam. Tidak hanya itu, dalam konteks regional, identitas "ASEAN" dengan prinsip-prinsip seperti kemandirian, kepercayaan diri, non-blok, dan konsensus kolektif juga mempengaruhi diplomasi Vietnam.

Misalnya, Vietnam dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara memiliki kebijakan yang sama untuk tidak bergabung dengan aliansi militer dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar – ini adalah identitas diplomatik regional yang terbentuk dari Gerakan Non-Blok dan ideologi independen dari negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II (Dewi Fortuna Anwar, 2018). Sarjana Indonesia Dewi Fortuna Anwar berkomentar bahwa "tidak peduli pemerintahan mana yang berkuasa, tema kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak berubah adalah kemerdekaan – otonomi dalam pengambilan keputusan dan kebebasan bertindak", tercermin dalam penolakan Indonesia yang terus-menerus untuk bergabung dengan aliansi militer dan tidak mengizinkan pangkalan asing di wilayahnya (Dewi Fortuna Anwar, 2018). Mirip dengan Vietnam, Indonesia mempromosikan "otonomi strategis", menganggapnya sebagai identitas asing yang perlu dipertahankan dalam menghadapi persaingan kekuatan besar. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa diplomasi identitas merupakan lensa yang berguna untuk menjelaskan kegigihan Vietnam (dan negara-negara ASEAN) dalam menegakkan prinsip-prinsip inti kebijakan luar negeri (seperti kemerdekaan, perdamaian, netralitas) sambil secara terampil menyesuaikan strategi sesuai dengan keadaan.

Singkatnya, gabungan landasan teori di atas memberikan suatu kerangka analitis yang komprehensif: realisme menjelaskan

keteguhan kepentingan dan seni menyeimbangkan kekuatan besar dalam diplomasi Vietnam; Konstruktivisme menekankan peran identitas historis-budaya dan ideologis dalam kebijakan luar negeri; Sementara itu, konsep kekuatan lunak dan diplomasi identitas menjelaskan alat dan metode fleksibel yang digunakan Vietnam untuk meningkatkan pengaruhnya. Bagian selanjutnya dari artikel ini akan menerapkan kerangka analitis ini untuk mempelajari tahap-tahap perkembangan kebijakan luar negeri Vietnam, dengan demikian menjelaskan bagaimana "diplomasi bambu" telah dibentuk dan dioperasikan dari tradisi hingga modernitas.

2. Konsep "diplomasi bambu" dan asal usulnya

Istilah "diplomasi bambu" pertama kali diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong pada Konferensi Diplomatik ke-29 (2016) dan kemudian ditegaskan pada Konferensi Nasional Urusan Luar Negeri tahun 2021. Alasan pemilihan bambu sebagai simbol, menurut penjelasan Bapak Trong, adalah karena bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan budaya Vietnam, melambangkan sifat-sifat yang bersifat fleksibel namun tangguh, baik hati namun gigih, tahu bagaimana bersikap lembut dan tegas, mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain - kebajikan yang terpancar dari jiwa dan semangat masyarakat Vietnam. (Minh Tu, 2024). Citra pohon bambu menyampaikan filosofi diplomatik "beradaptasi dengan semua perubahan": selalu memiliki "akar yang kuat" dari kepentingan dan prinsip yang tidak berubah, tetapi "cabang yang fleksibel" yang dapat berubah secara fleksibel seiring waktu (Nguyen Manh Hung, 2024). Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong merangkum karakteristik sekolah diplomasi "bambu Vietnam" sebagai berikut:

"Lembut, pintar, tetapi sangat ulet dan bertekad; fleksibel, kreatif tetapi sangat berani, teguh, dan berjiwa besar dalam menghadapi semua tantangan dan kesulitan demi kemerdekaan nasional, demi kebebasan dan kebahagiaan rakyat. Bersatu,

manusiawi, tetapi bertekad dan gigih dalam melindungi kepentingan nasional dan etnis" (Minh Tu, 2024).

Dengan kata lain, diplomasi bambu memerlukan perpaduan yang halus antara fleksibilitas dan ketegasan: fleksibel dalam strategi tetapi teguh dalam prinsip, fleksibel secara kreatif tetapi tidak kehilangan karakter dan kepentingan inti seseorang. Ini adalah tradisi yang sangat fleksibel yaitu "berjuang sambil bernegosiasi" yang digunakan oleh nenek moyang kita selama perjuangan kemerdekaan, sekarang ditingkatkan menjadi filosofi kebijakan luar negeri di masa damai.

Dari segi asal usul sejarah, semangat "bambu" telah merasuki diplomasi Vietnam sejak masa Presiden Ho Chi Minh. Selama perang perlawanan, Presiden Ho Chi Minh berpesan agar pejabat diplomatik harus teguh dalam pendirian dan mempertahankan prinsip, tetapi metode harus terampil dan fleksibel tergantung pada keadaan ((Minh Tu, 2024). Ucapannya yang terkenal "dengan yang tidak berubah, tanggapilah semua perubahan" pada tahun 1946 (dalam konteks negosiasi dengan Prancis) menjadi prinsip panduan bagi kebijakan luar negeri: mengambil kemerdekaan dan kedaulatan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, untuk menanggapi secara fleksibel semua situasi yang berubah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa "diplomasi bambu" periode baru merupakan warisan langsung dari ideologi diplomatik Ho Chi Minh, dan pada saat yang sama telah dikembangkan dan disistematisasi agar sesuai dengan konteks pasca-Perang Dingin dan integrasi internasional.

Dalam hal ideologi dan identitas ideologis, sekolah diplomasi bambu memiliki jejak kuat Marxisme-Leninisme dan pemikiran Ho Chi Minh, dipadukan dengan tradisi bangsa dalam diplomasi damai. Pada Konferensi Nasional Urusan Luar Negeri 2021, para pemimpin senior Vietnam menekankan bahwa sekolah diplomatik baru dikembangkan atas dasar teori Marxis-Leninis dan pemikiran Ho Chi Minh, mewarisi tradisi urusan luar negeri

dalam membangun dan membela negara, sambil secara proaktif menyerap intisari budaya diplomatik dunia . (Kamis Hoai, 2023). Dengan kata lain, “akar” bambu diplomatik adalah kemerdekaan dan kepercayaan diri nasional yang dipandu oleh ideologi Partai; “Batang” adalah kapasitas tangguh untuk mengatasi semua tantangan, membangun diplomasi multilateral yang mandiri dan percaya diri, siap menjadi sahabat dan mitra terpercaya masyarakat internasional selama 36 tahun inovasi; dan “ranting dan daun yang fleksibel” adalah motto “menggunakan yang tidak berubah untuk menghadapi yang terus berubah” - perilaku fleksibel, “tali lembut mengikat erat” untuk mencapai tujuan (Minh Tu, 2024).

Dengan demikian, “diplomasi bambu” merupakan kristalisasi dari tiga lapis nilai: (1) Nilai-nilai tradisional Vietnam – mencintai perdamaian, kemanusiaan namun gigih melawan penjajah asing (ditunjukkan melalui gambaran bambu yang dikaitkan dengan legenda Santo Giong yang mencabut bambu untuk melawan penjajah asing); (2) Pemikiran Ho Chi Minh - kemerdekaan nasional dikaitkan dengan internasionalisme, strategi fleksibel dikaitkan dengan tujuan yang teguh; (3) Semangat era baru - integrasi proaktif, menghormati hukum internasional, mempromosikan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. Pohon bambu Vietnam berakar kuat di tanah air (akar kokoh) dan cabangnya menyebar ke segala arah (cabang fleksibel) – menyiratkan bahwa Vietnam mempertahankan identitas nasionalnya tetapi tidak menutup pintu, tetapi sebaliknya secara fleksibel memperluas hubungan diplomatik globalnya. Berkat filosofi ini, diplomasi Vietnam telah mencapai banyak keberhasilan: hingga saat ini, Vietnam telah memiliki hubungan diplomatik dengan 190+ negara, menjalin 17 kemitraan strategis dan 13 kemitraan komprehensif, dan menjadi anggota aktif lebih dari 70 organisasi dan forum internasional penting (Minh Tu, 2024). Ini adalah contoh nyata keberhasilan sekolah diplomasi “bambu” dalam

mempertahankan independensi dan otonomi, sambil memaksimalkan sumber daya internasional untuk pembangunan nasional.

3. Tahapan perkembangan kebijakan luar negeri Vietnam dari perspektif “bambu”

a. Periode tradisional dan revolusioner (sebelum 1986)

Selama periode setelah 1945 hingga sebelum Doi Moi 1986, kebijakan luar negeri Vietnam sangat dipengaruhi oleh keadaan perjuangan untuk mendapatkan dan melindungi kemerdekaan dalam konteks Perang Dingin. Meski istilah “diplomasi bambu” belum dicetuskan pada saat itu, namun semangat “fleksibel namun tegas” tetap hadir secara konsisten. Pertama, dalam hal prinsip inti, Vietnam selalu berpegang pada tujuan kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Inilah “akar bambu” yang tidak dapat diubah, konsisten dengan prediksi realisme bahwa negara yang baru merdeka akan mengutamakan kelangsungan hidup dan kedaulatan di atas segalanya. Selama tahun 1950-an hingga 1970-an, Republik Demokratik Vietnam, meskipun menerima bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok, masih berupaya menjaga keseimbangan antara kedua sekutu utama ini ketika hubungan Soviet-Tiongkok putus, yang menunjukkan pola pikir yang independen dan otonom dalam urusan luar negeri. Setelah penyatuan kembali negara (1975), Vietnam bergabung dengan blok Sosialis dan menandatangani Perjanjian Persahabatan dengan Uni Soviet (1978) untuk memiliki tumpuan keamanan terhadap permusuhan Tiongkok dan negara-negara Barat, sambil masih berusaha mencari dialog dengan AS untuk menormalisasi hubungan (meskipun belum berhasil). Selama periode 1975-1986, akibat konfrontasi ideologis, Vietnam jatuh ke dalam situasi pengepungan dan embargo, sehingga harus condong sepenuhnya ke satu pihak (Uni Soviet) untuk bertahan hidup. Namun, bahkan saat itu, para pemimpin Vietnam masih menyadari fleksibilitas yang diperlukan: mencoba meredakan ketegangan dengan Tiongkok pada awal 1980-an dan mulai memiliki kebijakan

untuk mendiversifikasi hubungan ketika Uni Soviet dan Eropa Timur berada dalam krisis (Nguyen Manh Hung, 2024).

Kedua, dalam hal strategi diplomatik, Vietnam selama periode ini secara fleksibel menerapkan keseimbangan antara perjuangan dan negosiasi, antara ketangguhan dan kelembutan. Selama perang perlawanan melawan AS, Vietnam bersikap tegas di medan perang dan secara proaktif membuka saluran diplomatik (Konferensi Paris 1973) - sebuah bukti gagasan "cabang bambu yang fleksibel". Bahkan dengan negara-negara yang tidak memiliki ideologi yang sama, Vietnam tidak ragu untuk menjalin hubungan jika itu menguntungkan bagi revolusi: pada tahun 1973, Vietnam menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara Eropa Barat dan negara-negara berkembang, menunjukkan fleksibilitas lintas batas ideologis. Secara umum, pada periode pra-Doi Moi, "akar" diplomasi Vietnam adalah kemerdekaan nasional dan solidaritas dengan blok sosialis, sementara "cabangnya" kadang-kadang tidak benar-benar menjangkau jauh karena keterbatasan perang dan konfrontasi Timur-Barat. Namun, premis ideologis seperti independensi, otonomi, dan fleksibilitas strategis telah dibentuk, siap untuk titik balik Inovasi.

b. Periode renovasi dan integrasi (1986 hingga sekarang)

Kongres Partai ke-6 (1986) membuka era Pembaruan, memulai kebijakan luar negeri baru dengan fokus pada pembangunan ekonomi, mencabut embargo, dan mengintegrasikan Vietnam ke dunia. Semangat "bambu" pada periode ini ditunjukkan secara menonjol melalui motto "memperbanyak sahabat dan mengurangi musuh" serta melakukan multilateralisasi dan diversifikasi hubungan. Sejak Kongres ke-7 (1991), Vietnam dengan jelas menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama secara setara dan saling menguntungkan dengan semua negara, terlepas dari perbedaan rezim politik dan sosial, berdasarkan prinsip hidup

berdampingan secara damai (Nguyen Manh Hung, 2024). Ini adalah perubahan bersejarah: dari hubungan luar negeri terutama dalam blok sosialis, Vietnam membuka tangannya untuk semua negara. Pernyataan "Vietnam ingin berteman dengan semua negara di komunitas dunia, berjuang untuk perdamaian, kemerdekaan dan pembangunan" pada Konferensi Pertengahan Jangka ke-7 (1994) menandai pembentukan yang jelas dari kebijakan luar negeri baru (Nguyen Manh Hung, 2024). Masa ini dapat dianggap sebagai masa ketika pohon bambu Vietnam mulai menyebar luas ke lima benua, menegaskan jati diri asingnya yang mandiri, percaya diri, namun tetap fleksibel dan damai.

Sejak tahun 1990-an, Vietnam terus-menerus menerapkan kebijakan multilateralisasi dan diversifikasi hubungan luar negeri, dengan mempertahankan semboyan kemerdekaan, kemandirian, kerja sama, dan pembangunan (Nguyen Manh Hung, 2024). Vietnam menormalisasi hubungan dengan Tiongkok (1991), bergabung dengan ASEAN (1995), dan menormalisasi hubungan dengan AS (1995) - langkah-langkah yang menunjukkan fleksibilitas strategis dan pandangan ke depan tentang kepentingan nasional di lingkungan baru. Patut dicatat bahwa Vietnam bergabung dengan ASEAN dengan semangat integrasi ke dalam identitas diplomatik regional (ASEAN menekankan konsensus dan keseimbangan dalam hubungan negara-negara utama). Dari negara yang pernah menganggap ASEAN sebagai "alat AS", Vietnam dengan cepat beradaptasi dengan "gaya ASEAN" dan menjadi anggota aktif, menunjukkan fleksibilitas adaptasi diplomasi kita.

Selama tahun 2000-2010, diplomasi Vietnam memasuki periode integrasi internasional yang mendalam. Vietnam bergabung dengan WTO (2007), menjalin serangkaian kemitraan strategis dengan negara-negara besar (Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Korea Selatan, dll.) dan kemitraan komprehensif dengan Amerika Serikat (2013). Ini merupakan contoh khas dari strategi "cabang bambu fleksibel" -

memperluas dan menjalin kepentingan dengan banyak pihak, menghindari ketergantungan pada satu sumber daya saja. Pada Kongres Nasional ke-12 dan ke-13 (2016–2021), Vietnam terus menekankan tujuan “memastikan kepentingan nasional tertinggi berdasarkan prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, kesetaraan, kerja sama, dan saling menguntungkan” (Nguyen Manh Hung, 2024). Rumus ini menunjukkan perpaduan yang serasi antara realisme (mengutamakan kepentingan nasional) dengan liberalisme yang konstruktif (mematuhi hukum internasional dan kerja sama yang setara). Inilah filosofi “pragmatisme berprinsip”, sangat mirip dengan konotasi “diplomasi bambu”.

Praktik masa integrasi juga membuktikan efektivitas sekolah diplomatik ini. Vietnam telah memelihara hubungan persahabatan dengan Tiongkok dalam semangat bertetangga sosialis sambil memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif dengan negara-negara Barat, India, dan Jepang. Ketika pertikaian muncul di Laut Timur, Vietnam dengan tegas berjuang untuk melindungi kedaulatannya (tegas dalam prinsip) tetapi dengan terampil memelihara dialog, tidak membiarkan konflik meningkat (fleksibel dalam strategi). Para analis internasional mengatakan bahwa cara Vietnam menyeimbangkan hubungannya dengan negara-negara besar di tengah persaingan AS-Tiongkok yang semakin ketat merupakan perwujudan sukses diplomasi “bambu” – yang mantap namun fleksibel. Uni Eropa bahkan menghargai model diplomatik Vietnam sebagai mitra yang menerapkan kebijakan “pragmatisme berprinsip” yang serupa dengan nilai-nilai UE (Jasper Roctus, 2024).

Singkatnya, sejak Reformasi 1986, kebijakan luar negeri Vietnam telah mengalami perubahan strategis yang penting tetapi selalu konsisten dengan semangat kemerdekaan, kemandirian, perdamaian, dan kerja sama. “Diplomasi bambu” merupakan pola pikir yang membimbing (dinyatakan dalam dokumen:

independen namun fleksibel, terintegrasi secara mendalam namun tidak menyimpang dari prinsip) dan gaya implementasi (berperilaku lembut dan terampil dalam setiap situasi spesifik, memanfaatkan kekuatan lunak budaya dan hukum internasional). Hal ini memungkinkan Vietnam untuk tetap kuat dan cabang-cabangnya fleksibel dalam menghadapi semua perubahan: ketika tatanan dunia unipolar atau multipolar berubah, Vietnam masih dapat mempertahankan kesinambungan dalam kepentingan intinya (melindungi kedaulatan, keamanan, pembangunan) sambil secara fleksibel menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan zaman (dari berteman dengan negara-negara sosialis menjadi berteman dengan semua negara, dari integrasi ekonomi menjadi berkontribusi aktif terhadap isu-isu global, dll).

4. Identitas diplomatik Vietnam dalam konteks Asia Tenggara

Aspek penting untuk memahami “diplomasi bambu” adalah menempatkannya dalam konteks diplomasi regional Asia Tenggara, di mana negara-negara memiliki keadaan sejarah yang serupa dan membentuk nilai-nilai diplomatik yang sama. Identitas diplomatik Vietnam bersifat nasional dan mencerminkan identitas diplomatik ASEAN.

Pertama-tama, baik Vietnam maupun banyak negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, dll...) menganggap kemerdekaan dan kepercayaan diri sebagai dasar identitas asing. Kebijakan “tidak ada aliansi militer” dan “tidak ada pangkalan asing” yang dicanangkan Vietnam (sering disebut kebijakan “empat tidak”) mirip dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yaitu “kemerdekaan dan aktivisme”. Seperti yang dikatakan GS. Dewi Fortuna Anwar: “Indonesia selalu memastikan otonomi strategis, tidak ditarik ke dalam blok militer, dan menjaga kebebasan bertindak” (Dewi Fortuna Anwar, 2018). Inilah yang dilakukan Vietnam sejak Doi Moi – tidak bergabung dengan aliansi militer, berteman dengan setiap negara, dan membuat keputusan

berdasarkan kepentingan nasional. Salah satu ciri umum diplomasi Asia Tenggara dapat dilihat dari penekanan pada kedaulatan dan kemandirian dalam menentukan nasib sendiri, yang berasal dari pengalaman penjajahan dan Perang Dingin. "Bambu" Vietnam dalam beberapa hal mirip dengan "bambu ASEAN" – fleksibel terhadap angin (tekanan air besar) tetapi tidak patah karena telah berakar dalam di tanah yang mandiri.

Kedua, diplomasi Asia Tenggara terkenal dengan ASEAN Way yang menekankan prinsip konsensus, fleksibilitas, dan non-konfrontasi. Setelah bergabung dengan ASEAN, Vietnam dengan cepat beradaptasi dengan gaya ini, mempromosikan kekuatannya dalam kecerdikan dan fleksibilitas. Berkat itu, Vietnam dan ASEAN mampu menangani banyak isu rumit melalui dialog yang terus-menerus alih-alih konfrontasi, seperti masalah Kamboja di akhir tahun 1980-an atau pembangunan Kode Etik di Laut Timur saat ini. Inilah lambang diplomasi lunak di kawasan ini – menggunakan dialog, mediasi, dan kerja sama multilateral untuk menyelesaikan perselisihan, alih-alih menggunakan kekuatan keras. Identitas diplomatik Vietnam, dengan tradisi "menggunakan kecerdasan untuk mencapai tujuan yang sulit", telah berkontribusi terhadap keberhasilan diplomatik ASEAN secara keseluruhan. Vietnam dua kali memegang peran sebagai Ketua ASEAN (1998, 2020) dan sangat diapresiasi atas gaya kepemimpinannya yang moderat, fleksibel namun teguh pada prinsip-prinsip bersama. Ketiga, faktor identitas budaya dan nasional semakin banyak digunakan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam diplomasi – suatu bentuk diplomasi publik dengan identitas. Misalnya, Indonesia memiliki "diplomasi batik" (mempromosikan kain batik tradisional di acara-acara internasional), dan Thailand memiliki "diplomasi kuliner" (membawa makanan Thailand ke dunia). Vietnam juga secara aktif menggunakan simbol-simbol identitasnya dalam diplomasi: dari memberikan lukisan dan monokord Dong

Ho kepada tamu-tamu internasional, hingga menyelenggarakan festival budaya Vietnam di luar negeri. Bahkan gambar "pohon bambu" merupakan simbol budaya yang dipilih oleh Vietnam untuk menceritakan kisah identitas diplomatiknya kepada teman-teman internasional. Pengamat internasional mengakui bahwa identitas budaya dan sejarah yang uniklah yang membuat diplomasi Vietnam begitu menarik. Seorang jurnalis Tiongkok berkomentar: Diplomasi Vietnam di bawah kepemimpinan Tuan Nguyen Phu Trong dapat diringkas dalam frasa "sikap politik yang tegas, metode diplomatik yang fleksibel" (Thu Hoai, 2024). Seorang sarjana Inggris berkomentar bahwa diplomasi "bambu" Vietnam menunjukkan kekuatan untuk tidak melepaskan prinsip apa pun tetapi selalu beradaptasi secara fleksibel terhadap dunia yang terus berubah. Penilaian ini menunjukkan bahwa teman-teman internasional jelas memahami identitas diplomatik Vietnam - kombinasi harmonis antara fleksibilitas berprinsip dan pragmatis. Identitas inilah yang ingin dijunjung tinggi oleh banyak negara Asia Tenggara dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara adikuasa: teguh mempertahankan kemerdekaan, melindungi kepentingan nasional, namun fleksibel dan terampil menghindari konflik serta mengupayakan kerja sama yang maksimal (Thu Hoai, 2024).

Singkatnya, identitas diplomatik "bambu" Vietnam tidak terpisah dari lingkungan regional, tetapi sebaliknya berkontribusi pada identitas umum diplomasi Asia Tenggara: mempromosikan kemerdekaan, otonomi, fleksibilitas, menghargai kekuatan lunak budaya dan konsensus, dan menghindari konflik konfrontatif. Hal ini menjelaskan mengapa Vietnam telah memainkan peran yang baik setelah bergabung dengan ASEAN, dan mengapa "diplomasi bambu" juga telah didukung oleh teman-teman tetangga sebagai pendekatan yang tepat terhadap kawasan tersebut. Sekolah diplomatik dengan identitas Vietnam

ini memperkaya tradisi diplomatik Asia Tenggara, berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dalam konteks yang tidak stabil.

Kesimpulan

Dari analisis di atas, penulis dapat ditegaskan bahwa diplomasi "bambu" merupakan kristalisasi unik dari tradisi dan modernitas dalam politik luar negeri Vietnam. Secara tradisional, ia mewarisi pelajaran berharga dari sejarah pembangunan dan pertahanan negara: keteguhan dalam kedaulatan dan kepentingan nasional, seni "beradaptasi dengan semua perubahan" diplomasi Ho Chi Minh, dan semangat perdamaian tetapi tidak menyerah pada kekuasaan. Di era modern, "diplomasi bambu" mencerminkan kemampuan luar biasa Vietnam dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman: beralih dari konfrontasi ke dialog, dari isolasi ke integrasi, dan dengan terampil menerapkan kekuatan lunak dan hukum internasional untuk meningkatkan posisinya. Melalui kaca mata teori hubungan internasional, kita melihat dengan jelas bahwa diplomasi Vietnam merupakan persinggungan banyak faktor: realisme yang selalu mengedepankan kepentingan keamanan dan pembangunan, kreativitas yang selalu dipengaruhi oleh identitas budaya dan sejarah nasional, soft power yang mengetahui cara mengeksploitasi budaya dan nilai-nilai untuk menciptakan pengaruh, dan identitas yang selalu mempertahankan "jiwanya" sendiri dalam arus internasional. Oleh karena itu, bambu Vietnam tidak hanya kokoh di tanahnya sendiri tetapi juga selaras dengan hutan bambu ASEAN, menciptakan sekolah politik luar negeri yang bersifat nasional dan kontemporer.

Dalam konteks dunia yang berubah dengan cepat dan meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar, "diplomasi bambu" Vietnam semakin menunjukkan nilai arahnya. Filosofi untuk tetap teguh namun

fleksibel, luwes namun berani akan terus menjadi prinsip panduan bagi Vietnam untuk menangani hubungan secara harmonis dengan berbagai mitra, memanfaatkan lingkungan internasional yang mendukung untuk pembangunan sambil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Diplomasi Vietnam telah berkontribusi dalam menciptakan "prestasi luar biasa" bagi negara tersebut. Jalan ke depan tentu penuh tantangan, namun dengan akar persatuan nasional yang kuat dan cabang-cabang strategis yang fleksibel, Vietnam memiliki cukup keyakinan untuk bangkit dan meningkatkan posisinya di kawasan dan dunia, sejalan dengan semangat sekolah diplomatik "bambu Vietnam" yang penuh identitas dan kecerdasan.

Referensi

- Andrey Bibnev. (2021). *Soft Power: Dividing Potential And Actual*. <https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/58570#:~:text=As%20pointed%20out%20by%20the,rather%20than%20coercion%20or%20payments>).
- Anwar, D. F. (2018, November 14). *Strategic Autonomy Vital Part Of Indonesian Foreign Policy: Expert*. Asia Media Centre. <https://www.asiamediacentre.org.nz/news/indonesia-foreign-policy-dewi-fortuna-anwar>).
- Dewi Fortuna Anwar. (2018). *Strategic Autonomy Vital Part Of Indonesian Foreign Policy: Expert*. <https://www.asiamediacentre.org.nz/news/indonesia-foreign-policy-dewi-fortuna-anwar>).
- Jasper Roctus. (2024). *Vietnam's Bamboo Diplomacy: Between Beijing's Persistent Shadow and Growing Western Ties*. <https://www.egmontinstitute.be/vietnams-bamboo-diplomacy-between-beijings-persistent-shadow-and-growing-western-ties/#:~:text=under%20Vietnam%E2%80%99s%20Bamboo%20Diplomac>

- [y%20and,policy%20bedrock%20of%20Principled%20Pragmatism](#)).
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf).
- Nguyễn M. H. (2024). *Trường Phái Đối Ngoại, Ngoại Giao “Cây Tre Việt Nam” Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Đất Nước*. Tạp chí Công sản, (6-2024). <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/929902/truong-phai-doi-ngoai%2C-ngoai-giao-%E2%80%9Ccay-tre-viet-nam%E2%80%9D-trong-su-nghiep-doi-moi-dat-nuoc.aspx#:~:text=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BB%91i%20%C4%91%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i%20%C4%91%E1%B%95i.20>).
- Nguyễn Mạnh Hùng. (2024). Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Truy xuất từ <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/929902/truong-phai-doi-ngoai%2C-ngoai-giao-%E2%80%9Ccay-tre-viet-nam%E2%80%9D-trong-su-nghiep-doi-moi-dat-nuoc.aspx#:~:text=TCCS%20,ng%20h%20%E1%BA%BFt%20s%E1%BB%A9c%20quan%20tr%E1%BB%8Dng>).
- Thu Hoa. (2023). Nilai Khas Politik “Diplomasi Bambu Vietnam”. VOV World (bản tiếng Indonesia). <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/nilai-khas-politik-diplomasi-bambu-vietnam-1213155.vov#:~:text=internasional,bapak%20Khamvisan%20Keosouphan%2C%20mantan%20Penasihat>).
- Zhan Mengshu. (2020). A Brief Overview of Alexander Wendt's Constructivism. Truy xuất từ <https://www.e-ir.info/2020/05/19/a-brief-overview-of-alexander-wendts-constructivism/>).